

ABSTRAK

Perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI) telah membawa tantangan baru dalam penegakan hukum, termasuk kejahatan siber seperti *deepfake pornography*. Teknologi *deepfake* memungkinkan manipulasi visual maupun audio yang dapat merusak reputasi individu dan menyebabkan dampak yang serius. Sayangnya, Indonesia saat ini belum memiliki regulasi khusus yang mengatur penggunaan AI dalam konteks ini, sehingga perlindungan hukum bagi korban masih lemah. Meskipun KUHP dan UU ITE dapat digunakan, penerapannya masih ditemui banyak kendala. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, berfokus pada eksistensi pengaturan, urgensi pengaturan kecerdasan buatan, dan pengaturan yang ideal dalam penggunaan kecerdasan buatan dalam kasus *deepfake pornography*. Sebagai upaya melindungi korban, diperlukan regulasi yang mengatur penggunaan AI, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi bagi masyarakat guna mencegah penyalahgunaan teknologi ini. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat lebih adaptif dalam menghadapi tantangan era digital dan memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban kejahatan berbasis teknologi.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan (AI), *Deepfake Pornography*, Korban.

ABSTRACT

The development of technology, particularly artificial intelligence (AI), has brought new challenges in law enforcement, including cybercrimes such as deepfake pornography. Deepfake technology enables visual and audio manipulation that can damage an individual's reputation and cause serious consequences. Unfortunately, Indonesia currently lacks specific regulations governing AI use in this context, leaving legal protection for victims weak. Although the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) can be applied, their enforcement faces many challenges. This research employs a normative juridical method, focusing on the existence of regulations, the urgency of AI regulation, and the ideal framework for AI use in deepfake pornography cases. To protect victims, regulations on AI use, capacity-building for law enforcement officers, and public education are necessary to prevent the misuse of this technology. Thus, Indonesia's legal system can become more adaptive in facing digital era challenges and provide more effective protection for victims of technology-based crimes.

Keywords: Artificial Intelligence (AI), Deepfake Pornography, Victims.